



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan El.Tari No. 52, Kupang 85117

Telp: (0380) 832823, 833224.

Faks: (0380) 833224. Website: nttprov.go.id

PRES RELEASE

Perpustakaan Sahabat Baca Desa Kalikur Juara I Lomba Perpustakaan Umum NTT 2025

Kupang, 26 Agustus 2025

Kabar membanggakan datang dari Kabupaten Lembata. Perpustakaan Sahabat Baca Desa Kalikur berhasil menyabet Juara I Lomba Perpustakaan Umum (Desa/Kelurahan) Terbaik Tingkat Provinsi NTT 2025.

Kompetisi yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTT sejak 20 Juni hingga 25 Juli ini diikuti tujuh perpustakaan desa/kelurahan terbaik dari berbagai kabupaten/kota.

Hadiah untuk para pemenang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena pada Selasa, (26/8/2025) siang di ruang rapat Gubernur NTT.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyoroti perubahan perilaku masyarakat di era digital. Menurutnya, perkembangan teknologi memang membawa kemudahan, tetapi juga membuat minat orang datang ke perpustakaan semakin berkurang.

“Bukan berarti fungsi perpustakaan hilang. Justru perpustakaan harus terus kita dorong agar tetap hidup dan relevan. Perpustakaan harus terus berinovasi supaya minat baca khususnya generasi muda tetap tinggi walaupun di tengah gempuran dunia digital,” ujarnya.

Ia menegaskan, meski digitalisasi penting, ada sisi lain yang tidak boleh diabaikan. “Digitalisasi memang bagus, tetapi kadang justru membuat orang semakin malas berpikir. Literasi bukan sekadar menggulir layar, melainkan rajin membaca buku, menjadikannya rujukan, dan mengasah kemampuan berpikir kritis,” tegasnya.

Menurut Gubernur, membaca buku fisik memberi pengalaman berbeda dibandingkan dengan membaca ebook. “Membaca buku secara langsung itu menyentuh otak sekaligus hati. Rasanya beda ketika memegang buku dibanding hanya membaca lewat gawai. Biar bagaimanapun buku tetap yang terbaik,” tambahnya.

Ke depan, Pemprov NTT berkomitmen membuka ruang lebih luas bagi masyarakat terkhusus anak-anak sekolah untuk kembali membiasakan diri membaca buku fisik. Ia juga mendorong agar setiap desa dan kelurahan memiliki perpustakaan yang berfungsi sebagai rumah belajar sekaligus rumah kreasi.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTT, Stefanus G. de Rosari, menjelaskan bahwa lomba ini digelar bukan hanya untuk mencari juara, melainkan juga memotivasi pengelola perpustakaan desa/kelurahan agar terus berinovasi.

Dari total 1.190 perpustakaan desa/kelurahan di NTT, hanya tujuh yang ikut serta tahun ini. Penilaian dilakukan oleh tiga juri berkompeten, yakni Prof. Dr. R. Markus Leden, MP (Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi NTT), Krisno Hidayat (Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kupang), dan Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT (Widyaiswara Ahli Madya).

Berikut daftar pemenang Lomba Perpustakaan Umum (Desa/Kelurahan) Terbaik Tingkat Provinsi NTT 2025:

- Juara I : Perpustakaan Sahabat Baca Desa Kalikur (Kabupaten Lembata)
- Juara II : Perpustakaan Desa Geliting (Kabupaten Sikka)
- Juara III : Perpustakaan Desa Tapempah (Kabupaten TTU)
- Harapan I : Perpustakaan Tunbeis (Kelurahan Oepura, Kota Kupang)
- Harapan II : Perpustakaan Pojok Ilmu (Kelurahan Merdeka, Kota Kupang)
- Harapan III : Perpustakaan Desa Ponggeok (Kabupaten Manggarai)

Para pemenang masing-masing memperoleh piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan.

Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi ribuan perpustakaan desa/kelurahan lain di NTT untuk terus berbenah, berinovasi, dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar sekaligus ruang tumbuh literasi masyarakat.

Demikian Siaran Pers ini dibuat untuk dipublikasikan. #AyoBangunNTT

Penulis: Agustin Luju

Foto: Iqbal



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemantau Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT,

Doris Alexander Rihi, M.Si
Pemula Utama Muda (IV C)
NIP. 197012291990031005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan El.Tari No. 52, Kupang 85117

Telp: (0380) 832823, 833224.

Faks: (0380) 833224. Website: nttprov.go.id

PRES RELAESE

Gubernur Melki Laka Lena Menerima Audiensi Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang NTT

Selasa, 26 Agustus 2025

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, didampingi Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Yohanes Octovianus menerima audiensi Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang NTT, drh. Yohanes T. R. M. R. Simarmata, M.Sc, bersama jajaran di VIP Pemda Bandara El Tari, Selasa (26/8/2025).

Pertemuan ini membahas peningkatan kemitraan dan kerja sama antara PDHI dan Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya pengendalian penyakit rabies yang menjadi ancaman serius di berbagai wilayah NTT.

Ketua PDHI NTT menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya perlunya lockdown hewan anjing selama 6 bulan sebagai langkah efektif pencegahan penyebaran rabies, penguatan dukungan pemberantasan rabies, serta ketersediaan anggaran kesehatan hewan yang memadai.

“Kami mengapresiasi langkah lock down bagi hewan anjing selama 2 bulan, karena hingga saat ini NTT didominasi kasus rabies dari anjing melalui gigitan. Kami menyarankan 6 bulan lockdown anjing sebagai waktu terbaik,” ujar Yohanes.

PDHI juga menyoroti perlunya data akurat kasus rabies, serta kewaspadaan terhadap potensi penyebaran rabies di kawasan wisata seperti Gua Monyet.

“Kami berharap ketersediaan anggaran bagi kesehatan hewan menjadi perhatian disamping tindak pencegahan rabies melalui vaksinasi dan himbauan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTT menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat edukasi masyarakat dan menyiapkan langkah nyata pengendalian rabies. Ia menghimbau agar rangkaian kegiatan pencegahan rabies yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang dapat dikolaborasikan dengan jajaran Forkopimda dan stakeholder terkait.

“Kami serius mewujudkan NTT bebas rabies melalui langkah konkret, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat,” tegas Gubernur Melki Laka Lena.

Demikian Siaran Pers dibuat untuk dipublikasikan. #AyoBangunNTT

Penulis : Fara Therik

Foto : Dio Ceunfin

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT,

Doris Alexander Rihi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV C)
NIP. 197012291990031005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan El.Tari No. 52, Kupang 85117

Telp: (0380) 832823, 833224.

Faks: (0380) 833224. Website: nttprov.go.id

PRES RELAESE

Gubernur Melki Dukung Penuh Ajang Kreativitas Anak Muda Dalam RRI Fest

Kupang, 26 Agustus 2025

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo menerima audiensi dari Kepala stasiun RRI Kupang, Yulian Doky, Yayasan Rumah Musik Siloam, Adriana Kalla, DPD PAPPRI (Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia), Ray Nomseo, di ruang kerja Gubernur, Selasa (26/08/2025) siang.

Dalam pertemuan tersebut berbagai agenda dan masukan, khususnya terkait Hari Ulang Tahun RRI dan penyelenggaraan RRI Fest, lomba antar pelajar disampaikan oleh RRI Kupang dan Yayasan Rumah Musik Siloam yang diharapkan dapat menjadi ajang kreativitas generasi muda di bidang seni dan penyiaran.

Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap komunitas penyandang autisme, disabilitas dan Sekolah Luar Biasa (SLB), agar mereka dapat memperoleh ruang partisipasi yang setara dalam kegiatan seni, budaya, dan pendidikan.

Gubernur menyampaikan apresiasi atas kontribusi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terus hadir memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat NTT. Gubernur juga menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan RRI Fest yang berkolaborasi dengan Rumah Musik Siloam dan DPD PAPPRI, sebagai wujud pengembangan kreativitas dan seni musik di NTT.

“Sinergi semua pihak sangat dibutuhkan, Ini bukan hanya soal perayaan ulang tahun RRI, tetapi juga kesempatan bagi anak-anak kita, dari semua kalangan khususnya para penyandang disabilitas untuk berkarya dan menunjukkan potensi mereka. Kegiatan seperti ini juga harus dilaksanakan rutin agar para pelajar dapat mengisi waktu senggang mereka dengan berkreasi di panggung RRI Kupang”, ujarnya.

Pihak RRI Kupang, DPD PAPPRI NTT dan Yayasan Karya Musik Siloam menyatakan komitmennya untuk mendukung talenta lokal, khususnya para pelajar dan penyandang disabilitas, agar dapat tampil di panggung yang lebih luas. Mereka berharap lomba RRI Fest mampu menjadi wadah apresiasi dan pembinaan jangka panjang, bukan sekadar acara seremonial tahunan.

Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran pemerintah daerah bersama institusi seni terkait dalam mendukung kreativitas generasi muda serta memperluas akses bagi penyandang disabilitas. Melalui kegiatan seperti RRI Fest, diharapkan lahir karya-karya musik dan penyiaran yang mencerminkan semangat kebersamaan dan keberagaman budaya NTT.

Demikian Siaran Pers dibuat untuk dipublikasikan. #AyoBangunNTT

Penulis : Astrid Jeanette

Foto : Yozhy Hoely



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT,

Doris Alexander Rihi, M.Si
Pembona Utama Muda (IV C)
NIP. 197012291990031005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan El.Tari No. 52, Kupang 85117

Telp: (0380) 832823, 833224.

Faks: (0380) 833224. Website: nttprov.go.id

PRES RELEASE

Gubernur Dorong Kolaborasi Ciptakan Keamanan Transaksi Digital Untuk Ekosistem Ekonomi yang Aman dan Terpercaya

Kupang, 14 Agustus 2025

Dalam upaya memberikan serta meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan perlunya sinergi untuk memperkuat keamanan transaksi digital di NTT.

Demikian diungkapkannya saat menjadi Keynote Speech dalam acara Talk Show dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital Dalam Sistem Pembayaran” yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT pada Kamis 14 Agustus 2025.

Talkshow ini bertujuan meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang memanfaatkan sistem pembayaran digital di daerah, meningkatkan koordinasi antara regulator, lembaga yudikatif dan aparat penegak hukum. Ia mengatakan dengan sinergi bersama maka diharapkan dapat membuka peluang dan memastikan keamanan serta tata kelola sistem pembayaran digital di NTT.

“Digitalisasi sistem pembayaran di NTT harus didukung dengan keamanan dan tata kelola yang baik agar menciptakan ekosistem pasar digital yang kuat dan terpercaya. Perkembangan sektor ekonomi yang semakin mengandalkan transaksi digital akan lebih efektif dan efisien namun juga memunculkan peluang terjadinya kejahatan siber seperti pencurian data pribadi hingga pencucian uang,” tambahnya.

“Diharapkan dengan adanya peran Pemerintah, dan lembaga peradilan serta penegak hukum dan sinergi bersama perbankan akan semakin memperkuat keamanan transaksi digital,” ungkap Gubernur.

Gubernur menambahkan pentingnya menjaga kualitas ekosistem ekonomi melalui keamanan transaksi digital sebagai bentuk komitmen bersama memberikan kepercayaan dan keamanan bagi dunia usaha.

“Di sisi lain, iklim usaha yang sehat bergantung pada kepastian dan keamanan. Pelaku usaha, dari UMKM hingga investor besar, memerlukan jaminan bahwa investasi dan transaksi mereka dilindungi dari kejahatan siber,” kata Gubernur.

“Kita perlu membangun sebuah ekosistem keamanan siber yang tangguh. Agenda tersebut mencakup penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi, inovasi teknologi keamanan oleh sektor swasta, serta yang terpenting, sebuah gerakan literasi digital yang masif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BI NTT Agus Sistyo Widjajati, mengungkapkan, perlunya digitalisasi sebagai pendorong ekonomi, dengan perhatian khusus pada keamanan transaksi digital. Ia juga menyorot tiga langkah utama yakni edukasi masyarakat tentang produk secara digital, pemahaman risiko yang terkait, dan peningkatan literasi keuangan.

"Disamping itu peningkatan kapasitas masyarakat dan keamanan digital menjadi fokus utama dalam mendukung perkembangan ekonomi secara digital ini. kita lihat saat ini produk-produk asal NTT yang terus berkembang dan semakin diminati banyak orang seperti kain tenun. Maka perlu adanya tata kelola produk hingga penjualan dengan digitalisasi yang aman dan terpercaya," tambahnya.

Demikian Siaran Pers dibuat untuk dipublikasikan. #AyoBangunNTT

Penulis : Meldo Nailopo

Foto – Video : Baldus Sae – Dio Ceunfin



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT,

Doris Alexander Rihi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV C)
NIP. 197012291990031005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan El.Tari No. 52, Kupang 85117

Telp: (0380) 832823, 833224.

Faks: (0380) 833224. Website: nttprov.go.id

PRES RELAESE

Tinjau RPH Bimoku, Pj. Gubernur NTT Pastikan Daging Sapi Aman Dikonsumsi Masyarakat

Kupang, (Minggu, 12 Januari 2025)

Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P melakukan peninjauan ke Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia Bimoku – Kota Kupang, pada Minggu (12/1/2025). Turut hadir mendampingi Pj. Gubernur NTT pada kesempatan tersebut, Pj. Walikota Kupang, Linus Lusi, serta Kadis Pertanian Kota Kupang, Kabid Perternakan Provinsi NTT, dan juga Dokter Hewan Pengawas RPH Bimoku.

Setibanya di lokasi RPH Bimoku, Pj. Gubernur NTT didampingi Pj. Walikota Kupang serta petugas di RPH langsung menuju ke area kandang untuk mengecek langsung kondisi sapi-sapi tersebut. Selanjutnya, Pj. Gubernur NTT menuju ke ruang penyembelihan sapi untuk mengecek segala fasilitas dan peralatan pada gedung RPH tersebut.

Pj. Gubernur NTT pada kesempatan tersebut memastikan agar semua penyembelihan hewan (sapi) pada RPH Bimoku untuk selalu taat SOP sehingga daging yang didistribusikan juga terjaga kualitasnya.

“Kita ingin mengecek dan memastikan bahwa RPH ini menjalankan misi sesuai dengan SOP yang baik. Karena ini erat kaitannya dengan keamanan pangan, sehingga menjadi penting. Hewan-hewan yang masuk di RPH, kemudian di potong dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan yang kemudian hasilnya (daging sapi) yang dikeluarkan tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” jelas Pj. Gubernur Andriko.

Lebih lanjut, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Andriko menegaskan untuk menjaga dengan baik sapi-sapi betina produktif agar tidak masuk dalam penyembelihan.

“Peraturan terkait sapi yang boleh dipotong saya minta tolong untuk dipatuhi dan ditaati dengan baik. Tidak boleh melanggar aturan tersebut. Disitu sudah sangat jelas ditegaskan untuk tidak boleh memotong sapi betina produktif. Karena jika terjadi pelanggaran maka ancamannya akan dikenakan denda sejumlah 100-300 juta atau sanksi pidana 1-3 tahun kurungan,” tegas Andriko.

“Tapi sebenarnya poin yang paling penting adalah kalau kita memotong sapi yang produktif, itu berarti kita merencanakan kepunahan sapi kita. Jadi yang boleh dipotong adalah sapi jantan. Sapi betina produktifnya dipelihara dengan baik agar dia terus beranak. Karena ini adalah mesinnya, kalau kita potong artinya populasi sapi berkurang dan akan habis. Data menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir populasi sapi kita turun 40%, Populasi kerbau kita juga turun 60%,” ujar Pj. Gubernur Andriko.

“Jadi kalau kita tidak ikuti aturan dan tidak jaga dengan baik, maka 10 tahun ke depan bisa jadi sapi kita tinggal 20%. Akibatnya kebutuhan daging nasional akan dipenuhi dari impor, itu yang tidak kita harapkan. Pak Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa kita harus swasembada pangan. Dimana pangan itu bersumber dari sumber karbohidrat, sumber protein, sumber vitamin dan mineral. Semuanya itu harus kita penuhi dengan baik,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur NTT juga menyampaikan bahwa RPH Bimoku tidak memotong sapi yang telah mati. Ia menegaskan bahwa sapi-sapi yang dipotong adalah sapi-sapi yang sehat yang telah diperiksa secara baik oleh Dokter Hewan.

“Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa di RPH ini juga tidak

memotong sapi yang sudah mati. Jadi sapi yang masuk ke sini sudah sesuai dengan standar yang boleh di potong. Bahwa kemarin sempat ada kejadian sapi yang mati sebelum dipotong, namun oleh petugas dan sesuai dengan SOP, sapi tersebut sudah dikeluarkan dari RPH ini untuk segera dikubur dan jelas tidak dipotong untuk diperjual belikan. Ini juga sekaligus bahan edukasi kepada masyarakat agar tidak ragu lagi untuk mengkonsumsi daging yang keluar dari RPH ini,” terang Andriko.

Ke depan, Andriko berharap juga, RPH ini perlu ada pengembangan lebih masif, seperti penambahan sarana dan prasarana penunjang lainnya, sehingga kapasitas pemotongan bisa ditingkatkan lagi.

“Saya minta Pak Pj. Walikota dan jajaran untuk intens perhatikan RPH ini. Bisa dipikirkan, dirancang dengan baik dari sisi anggaran agar RPH ini dapat diperbaiki yang kurang-kurang, dan ditambah fasilitas sarana prasarananya. Terkait dengan kapasitas potong, jadi kalau optimal bisa sampai 2000 ekor sapi per bulan karena 1 kandang itu muat rata-rata 500/minggu. Tapi tadi dilaporkan 1 tahun sekitar 12.000, jadi optimal belum sampai sekitar 50%. Jadi saya minta Pak Pj. Walikota, karena ini sumber PAD juga, maka untuk melakukan pengawasan yang baik terkait dengan RPH ini.” Jelas Andriko.

Demikian Siaran Pers dibuat untuk dipublikasikan.

Penulis : Alex Raditia – Melan

Foto – Video : Dio Ceunfin – Edo

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT,

Doris Alexander Rihi, M.Si
Pemuda Utama Muda (IV C)
NIP. 197012291990031005

